

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada 11 September 2001, Amerika Serikat (AS) menjadi sasaran dari serangan teror oleh 4 pesawat komersial yang menabrakkan diri ke menara World Trade Center, Pentagon, dan lapangan Pennsylvania. Serangan teror yang dialami oleh AS tersebut diketahui merupakan ulah dari pemimpin Al-Qaeda, Osama Bin Laden, yang melancarkan aksinya dari Afghanistan yang saat itu sedang dipimpin oleh Taliban. Osama Bin Laden dapat melancarkan aksinya dari Afghanistan karena pada saat invasi Uni Soviet Laden turut membantu Afghanistan, dan pada saat itu Arab Saudi mencurigai Laden sebagai orang yang berbahaya karena dianggap memiliki pemikiran yang radikal (US, 2011). Serangan teror 9/11 tersebut yang terjadi di AS kemudian ikut menyeret Afghanistan dan Taliban yang saat itu sedang memimpin pemerintahan.

George W. Bush, pemimpin AS saat itu, dengan sigap merespon peristiwa teror 9/11. George W. Bush menyatakan bahwa tindakan teror yang menjadikan menara World Trade Center, Pentagon, dan lapangan Pennsylvania sebagai target sasarannya bukan hanya sebatas peristiwa teror biasa, namun lebih dari itu, yaitu lambaian berperang. Oleh sebab itu, George W. Bush menciptakan suatu kebijakan untuk melawan terorisme di dunia, kebijakan tersebut dinamakan *Global War on Terror* (GWOT). Ketika berpidato mengenai respon peristiwa 9/11, George W. Bush memaklumkan bahwa menjadikan masyarakat yang tidak berdosa sebagai korban pembunuhan adalah fatal, begitu juga dengan kekejaman terhadap perempuan dan anak – anak, pun akan selalu salah. Bush kemudian menekankan bahwa AS akan memimpin dunia untuk memberantas terorisme, dalam kasus 9/11 artinya menjadikan Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama Bin Laden sebagai target musuh utamanya (Snauwaert, 2004). Pada 14 September 2001, Kongres dan Senat AS pun memberikan izin untuk menggunakan kekuatan militer. George W. Bush diperbolehkan untuk menggunakan segala kekuatan militer AS untuk melawan terorisme baik organisasi maupun negara agar mampu memberantas tindakan terorisme di dunia.

Sebagai bentuk nyata perlawanan terhadap Al-Qaeda, AS meminta Mullah Mohammed Omar yang kala itu memimpin Afghanistan dibawah rezim Taliban untuk mengekstradisi Osama Bin Laden kepada AS karena menjadi tersangka dalam dibalik peristiwa 9/11, namun berakhir kepada penolakan oleh Mullah Mohammed Omar. Penolakan tersebut dianggap oleh AS sebagai bentuk dukungan Afghanistan dan rezim Taliban kepada Al-Qaeda. Akhirnya pada 7 Oktober 2001, AS menginvasi Afghanistan dalam rangka mewujudkan kebijakan GWOT dan memberantas terorisme di dunia. Invasi dimulai dengan operasi militer yang dinamakan *Operation Enduring Freedom* (OEF) yaitu operasi militer melalui serangan udara kepada Taliban dan Al-Qaeda. Dalam operasi militer OEF, George W. Bush mengirimkan sekitar 1.000 pasukan militer AS beserta *Central Intelligence Agency* (CIA) (Thomas, 2019).

Invasi yang dilakukan oleh AS juga memiliki sasaran untuk membantu masyarakat asli Afghanistan yang menentang rezim Taliban. Pertentangan tersebut dikarenakan banyaknya pelanggaran – pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim Taliban selama memerintah Afghanistan seperti kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan dewasa, melakukan hukuman fisik yang kejam, menindas kebebasan beragama, berekspresi, dan berpendidikan (Gossman & Adams, 2020). AS dibawah kepemimpinan George W. Bush melakukan penyerangan kepada Taliban di provinsi Kandahar hingga Kabul. Penyerangan tersebut berlangsung sejak Oktober hingga November 2001. Penyerangan oleh AS ke wilayah – wilayah yang dikuasai oleh Taliban tersebut menghantarkan rezim Taliban kepada keruntuhan rezimnya pada 9 Desember 2001. Pemimpin kelompok Taliban, Mullah Mohammed Omar, beserta petinggi – petinggi di Taliban melarikan diri dari Kandahar ke Pakistan.

Dalam invasi AS ke Afghanistan, AS turut membantu Afghanistan bertransisi menjadi negara demokrasi. AS merupakan salah satu negara yang menjadikan demokrasi sebagai nilai utama yang harus dianut karena prinsip – prinsip dasar dari politik luar negeri AS yaitu internasionalisme erat kaitannya dengan kesejahteraan, perdamaian, dan kebebasan. Demokrasi juga dipercaya oleh AS dapat menciptakan perdamaian dan keamanan, melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), menciptakan kebebasan, serta efektif untuk memberantas terorisme (Susanti & Monika, 2017).

Selain itu, demokrasi juga dapat membantu untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pernyataan tersebut dibuktikan dari 3 negara di benua Afrika yaitu Benin, Mali, dan Madagaskar yang berhasil menaikkan pertumbuhannya setelah melakukan demokratisasi (Afrimadona et al., 2019). Dalam menjalankan misinya AS dibantu oleh *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) dan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Disokong oleh PBB, Afghanistan mengadakan pertemuan di Bonn, Jerman dan menghasilkan pemerintahan interim Afghanistan yang dipimpin oleh Hamid Karzai. Otoritas Transnasional yang dipimpin oleh Hamid Karzai mendapat dukungan dan pengakuan langsung dari AS berupa ditunjuknya Ryan Crocker sebagai pimpinan kedutaan AS di Kabul. AS juga menunjukkan dukungan kepada Afghanistan dengan memberikan dana bantuan bagi Afghanistan untuk pembangunan dan korban dari konflik sejak invasi AS tahun 2001 sebesar 350 juta dolar AS (Susanti & Monika, 2017). Salah satu puncak dari transisi Afghanistan menjadi negara demokrasi adalah dengan menyelenggarakan pemilu perdananya pada 2004 dengan Hamid Karzai sebagai presidennya. Namun, perubahan bentuk negara Afghanistan menjadi negara demokrasi bukan berarti menandakan bahwa invasi militer AS di Afghanistan berakhir. Wakil Presiden AS kala itu, Dick Cheney, memberikan pernyataan bahwa meskipun Afghanistan telah merdeka namun mereka tetap memiliki musuh yang senantiasa dapat memberikan perlawanan kapan saja, yaitu kelompok Taliban (VOA Indonesia, 2004).

Pernyataan Cheney yang menyebutkan bahwa kelompok Taliban merupakan musuh di Afghanistan didasari dari pidato George W. Bush yang menyebutkan bahwa pasca peristiwa 9/11, Taliban tidak juga melakukan permintaan dari AS mengenai menutup kamp pelatihan teroris, menyerahkan para pemimpin Al-Qaeda termasuk Osama Bin Laden, serta memberikan akses kepulangan untuk warga negara asing termasuk warga negara AS yang diperlakukan secara tidak adil di Afghanistan (Bush, 2001). Hal tersebut kemudian membuat AS, NATO, dan PBB melakukan pelatihan untuk pasukan militer Afghanistan agar mampu untuk melakukan perlawanan kepada kelompok Taliban (Qazi & Chughtai, 2020).

Fokus AS yang terpecah untuk membebaskan rakyat Irak dan membantu Afghanistan bertransisi menjadi negara demokrasi membuat kelompok Taliban

memanfaatkan waktu tersebut untuk meningkatkan kekuatannya. Cepatnya kelompok Taliban dalam beradaptasi terhadap tantangan dan rintangan yang dihadapi akibat adanya invasi dan campur tangan AS di Afghanistan membuat kelompok Taliban mampu untuk melakukan gerilya. Kelompok Taliban melakukan upaya guna meningkatkan kekuatannya dengan melakukan improvisasi dan peningkatan di berbagai bidang seperti taktik perang dan pendekatan militer. Upaya peningkatan kekuatannya tersebut kemudian menghantarkan kelompok Taliban pada awal tahun 2006 melakukan gerilya tanpa henti. Ketidaktahuan AS dan NATO tentang dinamika wilayah Afghanistan hingga ke Pakistan, keterlibatan Pakistan dalam mendukung hidupnya kembali kelompok Taliban, pemahaman tentang geografi daerah pegunungan, dan tempat perlindungan yang aman bagi kelompok Taliban di wilayah Waziristan membuat kekuatan kelompok Taliban berhasil pulih dan meningkat (Chandra, 2008).

Dilansir dari laporan yang dirilis oleh Barry R. McCaffrey pada Juni 2006 tentang situasi keamanan di Afghanistan, McCaffrey menyatakan bahwa kelompok Taliban pada 2003 tetap beroperasi dengan unit yang kecil, terdiri dari 100 orang lebih, yang kemudian pada tahun ini semakin meningkat dengan melibatkan sekitar 400 orang. Dilaporkan kembali bahwa kelompok Taliban saat ini memiliki persenjataan yang baik dan teknologi perang baru berupa alat peledak, selain itu kelompok Taliban juga menerima pelatihan taktis, keahlian menembak, kamuflase sehingga berhasil membentuk kelompok Taliban yang sangat cerdas dan agresif dalam berperang (Chandra, 2008).

Eksistensi kelompok Taliban yang masih kuat di Afghanistan terus berlanjut sampai masa kepemimpinan Barack Obama, hal ini membuat Obama kemudian juga melanjutkan kebijakan yang sudah dicanangkan oleh mantan Presiden George W. Bush. Obama yang saat itu menjabat memberikan pernyataan bahwa misi invasi di Afghanistan tetap menjadi prioritas utama. AS kemudian mengirimkan 30.000 pasukan militer untuk mendukung Afghanistan melawan kekuatan dari kelompok Taliban sekaligus Al-Qaeda. Pengiriman pasukan militer yang berkala tersebut membuat jumlah pasukan militer AS di Afghanistan mencapai 100.000 pasukan, dimana pasukan militer AS merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan pasukan militer asing seperti yang dikirimkan oleh NATO. Penambahan pasukan

militer oleh AS memiliki maksud untuk dapat membalikkan kekuatan kelompok Taliban dan memperkuat *Afghan National Defense and Security Forces* (ANDSF).

Serius dalam menangani kejahatan terorisme yang didalangi oleh Al-Qaeda dan kelompok Taliban, Barack Obama merencanakan aksi untuk menyergap Osama Bin Laden dengan operasi militer bernama *Neptune Spear*. Operasi militer yang dilakukan pada tahun 2010 tersebut beranggotakan *U.S Navy SEAL* dari Grup Pengembangan Perang Khusus Angkatan Laut dan CIA. Setelah operasi penyergapan Osama Bin Laden berhasil, Barack Obama dan Hamid Karzai bersepakat untuk menandatangani *Bilateral Security Agreement* (BSA) antara AS dengan Afghanistan. Perjanjian tersebut mencakup bahasan mengenai diterimanya Afghanistan sebagai sekutu utama non-NATO AS dan bagaimana keterlibatan jangka panjang AS di Afghanistan. Pada tahun – tahun terakhir masa pemerintahannya Obama menyatakan bahwa AS akan terus mengirim pasukan militernya sekitar 9.800 pasukan selama tahun 2015. Selain menambah pasukan militer, Obama juga memerintahkan untuk melakukan penyerangan – penyerangan untuk menghentikan situasi yang memburuk akibat musuh (Thomas, 2019).

Pergantian masa kepemimpinan dari Barack Obama ke Donald Trump juga turut memberikan tanggapan mengenai strategi AS menangani kelompok Taliban di Afghanistan. Trump pada 21 Agustus 2017 melakukan pidato yang membahas secara keseluruhan bagaimana strategi AS kedepannya terhadap Afghanistan. Dalam pidatonya di Joint Base Myer-Henderson Hall, Virginia, Donald Trump menyoroti tentang pengorbanan pasukan militer AS di Afghanistan bahwa setiap pasukan militer AS baik laki – laki maupun perempuan yang dikirim ke luar negeri wajib kembali ke AS dan merasakan kedamaian. Donald Trump kemudian melanjutkan pidatonya dengan menyoroti invasi AS ke Afghanistan sejak 2001.

*“But we must also acknowledge the reality I am here to talk about tonight: that nearly 16 years after September 11 attacks, after the extraordinary sacrifice of blood and treasure, the American people are weary of war without victory. Nowhere is this more evident than with the war in Afghanistan, the longest war in American history, 17 years.”* (Trump, 2017b)

Menurut Trump, segala pengorbanan yang dilakukan oleh AS selama invasinya ke Afghanistan sejak 2001 tidak pernah membawa AS ke dalam

kemenangan. Justru, kebijakan luar negeri AS disebutkan oleh Trump telah terlalu banyak menghabiskan energi, uang, waktu, dan juga nyawa akibat berusaha membangun citra AS di keamanan internasional, maka dari itu daripada AS terus berusaha membangun citranya namun menghabiskan banyak waktu, uang, hingga nyawa pasukan militer yang berharga maka AS sebaiknya mengejar kepentingan keamanan nasionalnya.

*“That is why, shortly after my Inauguration, I directed Secretary of Defense Mattis and my national security team to undertake a comprehensive review of all strategic options in Afghanistan and South Asia. My original instinct was to pull out, and historically, I like following my instincts. But all my life, I've heard that decisions are much different when you sit behind the desk in the Oval Office, in other words, when you're President of the United States. So I studied Afghanistan in great detail and from every conceivable angle.”*  
(Trump, 2017b)

Trump melanjutkan bahwa setelah pelantikannya nanti ia akan mengarahkan Menteri Pertahanan untuk meninjau kembali kebijakan strategi AS di Afghanistan. Setelah mempelajari mengenai Afghanistan, Donald Trump menyoroti tiga poin penting mengenai kepentingan AS di Afghanistan, antara lain: 1) AS akan mencari hasil yang terhormat, seperti kemenangan, karena menghargai pengorbanan para pasukan militer yang gugur di medan perang; 2) AS tidak akan terburu – buru untuk melakukan penarikan diri dari Afghanistan karena besarnya konsekuensi yang akan didapatkan seperti terjadinya kekosongan keamanan di Afghanistan yang akan membuat kelompok teroris dengan mudah bersarang; 3) Ancaman yang harus diberhentikan oleh AS di Afghanistan dan kawasan sekitar seperti Pakistan masih sangat banyak termasuk 20 kelompok teroris yang masih aktif (Trump, 2017b).

Terakhir, dalam pidatonya Donald Trump menyebutkan bahwa AS memiliki strategi baru terhadap Afghanistan dimana AS akan mengubah strategi pendekatannya dari berbasis waktu menjadi pendekatan berbasis kondisi, artinya AS tidak lagi akan menjadikan kapan invasi di Afghanistan akan berakhir, karena strategi AS akan bergantung dengan kondisi di lapangan. Strategi baru tersebut juga akan membuat musuh dari AS tidak mampu memprediksi rencana AS kedepannya. Untuk memaksimalkan strategi barunya, AS kemudian akan mengirimkan 4.000 pasukan militer ke Afghanistan yang diamanatkan tugas untuk memberikan nasihat

dan arahan bagi pasukan militer Afghanistan dan bertugas untuk memaksimalkan program kontra-terorisme AS terhadap kelompok Taliban (Diamond, 2017).

Ternyata strategi Trump yang dimaknai sebagai strategi baru untuk keterlibatan AS di Afghanistan justru berubah haluan menjadi strategi untuk mengakhiri peperangan. Perbedaan strategi dan kebijakan AS pada tahun 2017 yang saat itu sedang dipimpin oleh Donald Trump dilandasi alasan – alasan yang kuat mengapa akhirnya AS memilih untuk melakukan perdamaian dengan kelompok Taliban yang sudah menjadi ancaman bagi AS dan dunia internasional sejak 2001. Apabila dikaitkan dengan keamanan internasional, maka konflik di Afghanistan sangat mengancam keamanan dan perdamaian. Jumlah rakyat sipil yang menjadi korban dari peperangan dikabarkan semakin meningkat pada tahun 2017, yaitu dengan jumlah 3.804 korban tewas (Wirawan, 2019). Selain menimbulkan korban jiwa baik dari rakyat sipil dan pasukan militer, perang di Afghanistan juga membawa kerugian berupa materi bagi AS, dana yang AS gelontorkan mencapai \$2 triliun untuk anggaran berperang serta \$1,4 triliun untuk anggaran medis dan kecacatan para tentara militer perang pasca 9/11 (Amin et al., 2021). Melihat dampak buruk dan kerugian yang didapatkan oleh AS selama invasi yang dilakukan di Afghanistan untuk memberantas kelompok Taliban sebagai kelompok teroris dan bersenjata, AS memutuskan untuk melakukan perdamaian dengan kelompok Taliban yang diwujudkan dengan adanya penandatanganan perjanjian damai pada 29 Februari 2020 di Doha, Qatar.

Pada bagian *literature review*, peneliti akan menyajikan beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Bagian ini terdiri dari dua kelompok tulisan yang dikelompokkan berdasarkan tema tulisan yaitu tulisan yang bertemakan upaya AS dalam konflik internasional dan dinamika hubungan AS dengan kelompok Taliban pada 2017 – 2020. Pengelompokkan tersebut bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan posisi penelitian di dalam kajian mengenai studi perdamaian dan resolusi konflik. Kelompok *literature* pertama dalam penelitian terdahulu akan membahas mengenai upaya AS dalam konflik internasional. *Literature* yang akan dibahas mengenai posisi AS dalam konflik di Mozambik (Simanjuntak, 2020), upaya AS dalam pelucutan senjata nuklir di Korea

Utara (Kusuma & Putri, 2019), dan peran AS dalam perang Vietnam (Nauvarian, 2019).

Simanjuntak (2020) membahas mengenai posisi AS dalam menangani konflik di Mozambik menggunakan konsep resolusi konflik. Dengan menggunakan metode deskriptif, tulisannya menampilkan fakta – fakta guna mendeskripsikan bagaimana dan seperti apa posisi AS dalam menangani konflik di Mozambik. Hasil tulisannya adalah konsep resolusi konflik yang digunakan menganalisis peran AS dalam *peacemaking* dengan berupaya untuk memberikan bantuan untuk pembangunan ekonomi guna meningkatkan standar kehidupan di Mozambik dan melakukan negosiasi dengan negara – negara dalam *Contact Group*. Selanjutnya dalam *peacebuilding*, AS membantu Mozambik untuk meningkatkan jumlah usaha kecil dan menengah serta investasi asing di Mozambik.

Selain Simanjuntak (2020), Kusuma dan Putri (2021) juga membahas mengenai peran AS dalam menjaga perdamaian dan keamanan di dunia internasional. Fokus pembahasan dalam tulisannya adalah upaya AS dalam melucuti senjata nuklir di Korea Utara dengan konsep kepentingan nasional, politik luar negeri, kebijakan luar negeri, dan *security dilemma*. Dengan menggunakan metode kualitatif, tulisannya mendeskripsikan peran AS dalam proses *denuclearization*. Hasil dari tulisannya adalah keterlibatan AS dalam melucuti senjata nuklir di Korea Utara didasari oleh perhatian AS pada bidang keamanan internasional, AS juga merupakan salah satu negara yang mendorong berdirinya *Non-Proliferation Treaty* (NPT). Kebijakan yang diambil oleh AS adalah *pressure* dimana Donald Trump memberikan ancaman berupa sanksi ekonomi terhadap Korea Utara dan *engagement* melalui pendekatan diplomasi. Namun kebijakan AS tidak berhasil dalam proses *denuclearization* Korea Utara. Selanjutnya Nauvarian (2019) memiliki fokus pembahasan keterlibatan AS dalam perang Vietnam. Dengan menggunakan Teori Perdamaian Demokratis, tulisannya memiliki argumentasi bahwa keterlibatan AS didasari dari kebijakan AS yang menginginkan demokratisasi Vietnam. Hasil dari tulisannya adalah terdapat banyak pertimbangan baik dari faktor rasional sampai irrasional yang digunakan AS dalam perang Vietnam.

Kelompok *literature* kedua dalam penelitian terdahulu akan membahas mengenai dinamika hubungan AS dengan kelompok Taliban pada 2017 – 2020. *Literature* yang akan dibahas mengenai perspektif *China Pakistan Economic Corridor* (CPEC) dalam memandang *U.S-Taliban Peace Talks* (H. Ullah et al., 2020), pemberontakan sepanjang *U.S-Taliban Talks* (A. Ullah et al., 2020), fakta dan mitos sepanjang *Afghan Talks* (Tariq, 2020), pro dan kontra selama penarikan pasukan militer AS bagi Afghanistan (Soherwordi & Wahid, 2021), masa depan Afghanistan selama proses negosiasi dengan kelompok Taliban (NASRAT, 2020), dan prospek masa depan setelah perjanjian damai AS dan kelompok Taliban (Amin et al., 2021).

Ullah, Ahmad dan Khan (2020) membahas mengenai perjanjian damai antara AS dengan kelompok Taliban yang berhasil ditandatangani pada 29 Februari 2020 dalam kacamata CPEC. Terdapat beberapa poin yang termasuk kedalam perjanjian damai, yaitu: 1) Komitmen AS dalam menarik 5.000 pasukan militernya dalam 135 hari; 2) Penarikan seluruh pasukan militernya dalam waktu 4 bulan setelah ditandatangani; 3) Pertukaran tahanan antara Afghanistan dan kelompok Taliban; 4) Dihapusnya sanksi internasional terhadap kelompok Taliban; dan 5) Kelompok Taliban wajib mencegah kelompok teroris beroperasi di Afghanistan dan membahayakan AS dan sekutu. Hubungan CPEC dengan Afghanistan yang saling timbal balik juga mendapatkan dampak positif dari perjanjian damai AS dengan kelompok Taliban. Sebelum perjanjian damai terwujud, ketidakstabilan di Afghanistan membuat investor asing enggan berinvestasi di Afghanistan melalui CPEC, serta membawa efek bagi stabilitas Pakistan, padahal CPEC merupakan kesempatan emas bagi Afghanistan untuk dapat mengembangkan ekonomi dan infrastrukturnya.

Hasil dari tulisan Ullah, Ahmad, dan Khan (2020) adalah perjanjian damai AS dan kelompok Taliban menghantarkan dampak positif bagi CPEC dan Afghanistan. Stabilitas di Afghanistan akhirnya terwujud dan membawa dampak langsung bagi Pakistan. Proyek – proyek yang diinisiasi oleh CPEC kemudian memainkan peran yang besar dalam menciptakan kestabilan dan kedamaian yang langgeng di Afghanistan. Realisasi dari poin – poin dalam perjanjian damai antara

AS dan kelompok Taliban merupakan faktor paling penting agar Pakistan dan CPEC dapat berjalan dengan sukses di Afghanistan.

Selanjutnya dari perspektif Afghanistan, Ullah, Sultana, dan Kokab (2020) lebih menekankan fokus pembahasannya dalam pemberontakan yang terjadi sepanjang pembicaraan damai antara AS dengan kelompok Taliban berlangsung. Eskalasi konflik selama pembicaraan damai antara yang dilakukan oleh kelompok Taliban menjadi strategi bagi mereka agar mendapatkan insentif yang lebih besar dari negosiasi yang sedang berlangsung. Selama pembicaraan damai berlangsung, kekerasan dan pemberontakan terus – menerus berlangsung. Menurut data, korban tewas selama 2009 – 2018 selalu mengalami peningkatan dimana pada 2018 tepat saat proses pembicaraan damai berlangsung terdapat 3.804 korban tewas. Proses negosiasi antara AS dan kelompok Taliban juga sempat terhambat akibat adanya pembunuhan seorang tentara AS bersama dengan 11 korban lainnya di Kabul.

Hasil dari tulisan Ullah, Sultana, dan Kokab (2020) menyebutkan bahwa janji kelompok Taliban bahwa akan mengurangi kekerasan di Afghanistan hanyalah strategi untuk mendapat banyak keuntungan selama proses pembicaraan damai. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Afghanistan mengkonfirmasi bahwa 80% kekerasan di Afghanistan menurun yang akhirnya membuat perjanjian damai berhasil disepakati oleh AS dan kelompok Taliban. Namun, setelah perjanjian ditandatangani kekerasan kembali meningkat karena kelompok Taliban merasa mereka mendapatkan kemenangan di Afghanistan dan mengakibatkan tewasnya 25 sampai 40 pasukan keamanan Afghanistan tewas pada bulan April sampai Mei. Dengan fenomena tersebut, selepas peninggalan AS dari Afghanistan dapat membuat Afghanistan menjadi negara yang lemah.

Apabila tulisan Ullah, Sultana, dan Kokab (2020) menyebutkan bahwa pemberontakan dan kekerasan terus meningkat sejak proses pembicaraan damai sampai perjanjian damai berhasil disepakati, tulisan dari Tariq (2020) justru memiliki pandangan yang berbeda mengenai kekerasan sepanjang perundingan damai. Sebelum perjanjian damai disepakati, pejabat senior AS menyebutkan bahwa kelompok Taliban menunjukkan itikad yang baik karena berhasil menurunkan kekerasan di Afghanistan, hal ini berbeda dengan keamanan di Afghanistan pada kuartal empat tahun 2019 yang menjadi tahun dengan serangan

terbesar oleh kelompok Taliban sejak 2010. Hasil dari tulisan Tariq (2020) adalah bahwa teori Realisme dinilai kurang tepat karena aktor non-negara seperti kelompok Taliban juga harus dilibatkan dalam politik kekuasaan suatu negara. Selain itu, dalam rangka memberantas kejahatan internasional dan terorisme, peperangan bukanlah hal yang tepat, upaya penyelesaian melalui negosiasi, diplomasi, dan kesepakatan damai adalah solusi terbaik untuk memberhentikan terorisme dan pemberontakan seperti yang dilakukan oleh kelompok Taliban di Afghanistan.

Soherwordi dan Wahid (2021) membahas mengenai pro dan kontra selama penarikan pasukan militer AS. Hasil dari tulisannya menjabarkan mengenai pendapat dari salah satu organisasi Think Tank AS, *RAND Corporation*, bahwa penarikan pasukan militer AS dapat memberikan pengaruh langsung bagi Afghanistan, yakni: 1) Kerja sama dalam misi pelatihan dan bantuan untuk pasukan militer Afghanistan yang dilakukan oleh AS, NATO, Jerman, dan Italia akan terhenti; 2) Kepergian pekerja bantuan, pejabat sipil, hingga diplomat dari Afghanistan; 3) Mundurnya intelijen AS dari Afghanistan yang mengakibatkan penurunan pengumpulan informasi tentang *the Islamic State of Iraq and al-Sham* (ISIS), kelompok Taliban, dan kelompok teroris lainnya; 4) Terjadinya pengurangan bantuan ekonomi dan keamanan di Afghanistan; 5) kelompok Taliban akan semakin kuat di Afghanistan; dan 6) Kelompok teroris seperti ISIS akan Menyusun ulang strategi untuk menyerang kepentingan AS.

Untuk melihat seperti apa prospek masa depan dari perjanjian damai antara AS dengan kelompok Taliban, Nasrat (2020) serta Amin, Awan, dan Naseem (2021) memiliki tulisan yang senada namun memiliki perbedaan sudut pandang. Nasrat (2020) memiliki fokus pembahasan terhadap masa depan Afghanistan selama proses negosiasi dengan kelompok Taliban. Negosiasi yang terjadi antara otoritas AS dengan perwakilan kelompok Taliban sejak Oktober 2018 sudah berjalan sebanyak 7 kali untuk memastikan bagaimana kelanjutan AS di Afghanistan dan memastikan bahwa tidak adanya lagi kelompok teroris dan pemberontakan di wilayah Afghanistan yang menjadi ancaman bagi dunia internasional. Hasil dari tulisannya mempertanyakan apakah proses negosiasi dalam rangka mewujudkan perdamaian dapat berhasil, ditambah lagi apakah PBB

mampu untuk menjamin bahwa selama proses negosiasi berlangsung keamanan di kawasan Afghanistan dapat terjaga. Dalam menjawab pertanyaannya sendiri, Nasrat (2020) memiliki asumsi bahwa selama proses negosiasi dan rekonsiliasi didasari oleh keegoisan dari kelompok Taliban dan Afghanistan. Selain itu, negosiasi perdamaian memang telah banyak gagal di berbagai negara dan justru membawa kelompok teroris menjadi semakin kuat. Apabila negosiasi perdamaian antara AS dengan kelompok Taliban turut gagal, maka disebabkan oleh beberapa alasan seperti: 1) Pemerintahan Afghanistan yang lemah dan banyak korupsi; 2) Banyaknya intervensi negara asing; 3) Sulitnya bernegosiasi; 4) Masih ada rakyat sipil yang mendukung kelompok Taliban. Nasrat (2020) memberikan solusi agar negosiasi perdamaian dapat berjalan lancar, yaitu: 1) Negosiasi harus memiliki rencana dan tenggat waktu yang jelas; 2) Peran pemerintah Afghanistan harus jelas; 3) Taat dengan hukum; 4) Pihak yang terlibat negosiasi harus jelas.

Tulisan dari Amin, Awan, dan Naseem (2021) memiliki fokus pembahasan tentang prospek masa depan setelah perjanjian damai AS dan kelompok Taliban. Rincian anggaran perang selama AS di Afghanistan memakan dana yang sangat besar, maka dari itu AS menekankan bahwa negosiasi perdamaian dengan kelompok Taliban harus menghasilkan kesepakatan damai. Hasil dari tulisannya adalah terdapat prospek masa depan beserta harapan dan optimisme setelah perjanjian damai resmi diwujudkan. Kesepakatan damai antara AS dengan kelompok Taliban membawa *win – win situation* bagi kedua pihak, antara lain: 1) AS berhasil menghapus Al-Qaeda yang merupakan musuh utama; 2) Penarikan pasukan militer AS mundur tanpa penghinaan; 3) Tanda kemenangan bagi kelompok Taliban karena menjamin bahwa pasukan asing akan pergi dari Afghanistan; 4) 5.000 tahanan kelompok Taliban dibebaskan dalam tepat waktu. Namun, menurut pemikiran Amin, Awan, dan Naseem (2021), keberhasilan dalam merealisasikan kesepakatan – kesepakatan dalam perjanjian damai bergantung kepada pihak eksternal seperti AS, Cina, dan Rusia.

Dari beberapa *literature* yang sudah dijabarkan mengenai upaya AS dalam konflik internasional dan dinamika hubungan AS dengan kelompok Taliban pada 2017 – 2020 dapat dilihat bahwasannya topik mengenai upaya AS dalam isu perdamaian dan resolusi konflik merupakan topik yang menarik untuk diteliti. Hal

tersebut dapat terlihat dari beberapa *literature* diatas yang sudah menjabarkan upaya dan peran AS dalam konflik internasional dan seperti apa dinamika hubungan AS dengan kelompok Taliban. Namun, terdapat kekosongan dan kelemahan pada *literature* di atas khususnya pada topik – topik yang mengangkat mengenai dinamika hubungan AS dengan kelompok Taliban. Penjelasan dan analisa mengenai bagaimana upaya dan proses AS dalam mewujudkan perjanjian damai dengan kelompok Taliban pada periode 2017 – 2020 tidak terdapat pada keseluruhan *literature* di atas. Padahal, perang dan konflik yang terjadi di Afghanistan dimana AS melakukan invasi sejak 2001 sampai akhirnya mampu bersepakat untuk berdamai merupakan hal yang menarik. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk menggambarkan dan mendeskripsikan tentang upaya dan proses AS dalam mewujudkan perjanjian damai dengan kelompok Taliban.

Maka dari itu, melihat perubahan strategi AS pada tahun 2017 terhadap kelompok Taliban membuat penelitian ini penting untuk dikaji. Urgensi penelitian ini adalah untuk melihat apa yang menjadi alasan AS akhirnya setuju untuk menarik diri dari konflik internasional di Afghanistan dengan cara melakukan negosiasi perdamaian dengan kelompok Taliban yang akan dilihat pertimbangan dan alasannya melalui *Rational Choice Theory*, serta melihat bagaimana upaya dan proses AS dalam mewujudkan perdamaian dengan kelompok Taliban periode 2017 – 2020 melalui konsep resolusi konflik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, batasan masalah yang akan dikaji adalah upaya serta proses AS dalam mewujudkan perdamaian dengan kelompok Taliban periode 2017 - 2020. Eksistensi kelompok Taliban yang masih tinggi di wilayah Afghanistan sampai Pakistan setelah invasi dan demokratisasi yang dilakukan oleh AS di Afghanistan membuat AS masih harus menempuh cara – cara untuk melakukan perlawanan kepada kelompok Taliban. Namun, berdasarkan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang didapat oleh AS sejak invasinya pada 2001 membuat AS pada 2018 mulai memikirkan mengenai negosiasi perdamaian dengan kelompok Taliban. Perubahan keputusan AS pada tahun 2018 terhadap masa depan hubungannya dengan kelompok Taliban membuat permasalahan dalam penelitian

ini penting untuk dikaji lebih lanjut agar dapat melihat bagaimana proses terwujudnya perdamaian antara kedua pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana upaya AS dalam mewujudkan perdamaian dengan kelompok Taliban periode 2017-2020?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Menjabarkan bagaimana upaya AS dalam mewujudkan perdamaian dengan kelompok Taliban.
- b. Menggambarkan proses perdamaian antara AS dengan kelompok Taliban.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan khususnya bagi peneliti dan mahasiswa Hubungan Internasional dalam memahami proses perdamaian antara AS dan kelompok Taliban di Afghanistan.

- b. Manfaat Akademis

Secara akademis, manfaat dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi pembaca khususnya mahasiswa Hubungan Internasional dalam memahami teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini guna mengkaji fenomena tentang konflik dan resolusi konflik tentang perdamaian antara AS dan kelompok Taliban di Afghanistan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memahami alur pemikiran dari penelitian ini, maka penelitian ini dibagi kedalam bagian – bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab. Sistematika penulisan dibagi kedalam VI bab, yaitu:

#### **A. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I ini peneliti menjabarkan mengenai latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **B. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini peneliti menjelaskan mengenai tinjauan pustaka, memberikan perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian – penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran, alur pemikiran, dan argumen utama.

## **C. BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab III ini dijelaskan tentang metode yang peneliti gunakan, bagaimana peneliti melakukan penelitian serta dari mana data – data yang digunakan didapatkan oleh peneliti seperti penjelasan mengenai pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, serta waktu dan lokasi penelitian.

## **D. BAB IV PERUBAHAN STRATEGI AS TERHADAP KELOMPOK TALIBAN**

Pada bab IV ini peneliti akan menjabarkan mengenai strategi AS dan alasan dari berbagai faktor AS mengubah strategi nasionalnya dari berkonflik menjadi berdamai.

## **E. BAB V UPAYA AS DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DENGAN KELOMPOK TALIBAN DI AFGHANISTAN PERIODE 2017 – 2020**

Pada bab V ini peneliti akan menjabarkan mengenai proses dan upaya AS dalam mewujudkan perdamaian dengan kelompok Taliban periode 2017 – 2020.

## **F. BAB VI PENUTUP**

Pada bab VI ini peneliti akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.